

## **BAB II**

### **HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA PALESTINA**

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan tentang hubungan diplomatik Indonesia dan Palestina. Dimulai dari sejarah adanya hubungan diplomatik yang terjalin diantara kedua negara yaitu Indonesia dan Palestina. Kemudian penulis akan menjelaskan berbagai bentuk dukungan yang telah diberikan Indonesia untuk Palestina sebagai bentuk nyata hubungan diplomatik kedua negara. Dan pada sub bab terkahir penulis akan menjelaskan tentang alasan atau tujuan Indonesia dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina.

#### **A. Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia dan Palestina**

Sejak kemerdekaan Indonesia yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan negara lain selalu berpegang teguh pada haluan politik luar negerinya yang bebas aktif berdasarkan UUD 1945. Dalam prakteknya, Indonesia erat menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah salah satunya dengan negara Palestina. Hubungan diantara kedua negara ini masih berjalan sangat baik hingga detik ini, “negara saudara” itulah yang sering kita dengar untuk menggambarkan betapa eratnya hubungan kedua negara ini terjalin.

Hubungan diantara kedua negara ini diawali ketika Palestina mendukung kedaulatan Indonesia. Saat diproklamasikannya kemerdekaan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) oleh Soekarno & Hatta pada 17 Agustus 1945, tidak ada satupun Negara di dunia yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Ketika itu Indonesia telah berusaha untuk melakukan lobi agar kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Indonesia dapat diakui masyarakat di dunia, yakni dengan cara mengirimkan delegasi ke beberapa bagian negara seperti Eropa Timur dan Timur Tengah. Akhirnya usaha yang dilakukan Indonesia melalui pengiriman delegasi membuahkan hasil. Jamaa'ah Ikhwanul Muslimin di Mesir yang saat itu dipimpin oleh Imam Hasan Al Banna dan Mufti Palestina bernama Syaikh Muhammad Amin Alhusaini membantu Indonesia untuk melakukan lobi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Sehingga pada 22 Maret 1946 Kerajaan Mesir secara *defacto* mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, hal ini merupakan pengakuan pertama dari negara sahabat terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Nopember 1946 Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab kemudian memutuskan agar negara-negara anggotanya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia baik secara *defacto* maupun *dejure*. Dan diikuti oleh negara-negara lain yang kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia diantaranya Lebanon (29 Juni 1947), Suriah (2 Juli 1947), Afghanistan (23 September 1947), Myanmar (23 November 1947), Arab Saudi (24 November 1947), Yaman (4 Mei 1948), dan Uni Soviet (26 Mei 1948).

Selain itu Indonesia juga merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestina di Aljazair pada 15 November 1988. Telah ditanda tangannya "Komunike Bersama

Pembukaan Hubungan Diplomatik” pada 19 Oktober 1989 antara Menteri Luar Negeri Indonesia yang saat itu dijabat oleh Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Farouq Kaddoumi menjadi sejarah awal dimulainya hubungan kedua negara secara resmi yang sekaligus menandai telah dibukanya Kantor Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.

#### **B. Berbagai Bentuk Dukungan dan Bantuan Indonesia untuk Palestina**

Kondisi Palestina yang hingga saat ini masih menghadapi konflik dengan Israel terutama dalam hal masalah perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina membuat beberapa negara di dunia termasuk Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada bangsa Palestina. Sejak dimulainya hubungan diplomatik kedua negara secara resmi, Indonesia tidak henti-hentinya memberikan berbagai bentuk dukungan untuk Palestina. Mulai dari dukungan suara penuh untuk pengakuan kedaulatan Palestina hingga berbagai bentuk bantuan regional yang saat ini masih terus dilakukan oleh Indonesia. Untuk membantu Palestina dalam menghadapi permasalahan perlindungan dan kesejahteraan anak tentu saja Palestina harus lebih dulu merdeka dan berdaulat. Hal ini bertujuan agar perlindungan dan kesejahteraan anak di Palestina dapat benar-benar terjamin.

**Tabel II. 1 Berbagai Dukungan dan Bantuan Indonesia Untuk Palestina**

**Sebelum Masa Pemerintahan Joko Widodo**

No	Tanggal	Capaian
1	19 Oktober 1989	Ditanda tangannya “Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik” dan secara resmi membuka Kantor Kedutaan Besar Palestina di Jakarta
2	19 Oktober 2000	Indonesia dengan 19 negara lainnya menyetujui resolusi yang dihasilkan pada Sidang Khusus Komisi HAM PBB
3	16 Oktober 2006	Indonesia terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang kemudian merancang program kerja terkait permasalahan Palestina.
4	9 - 12 Januari 2009	Sebagai anggota Dewan HAM PBB Indonesia berhasil dalam menginisiasi dilaksanakannya <i>Special Session</i> Dewan HAM PBB di Palais des Nations, Jenewa, Swiss
5	29 November 2012	Indonesia memberikan hak suara penuh mendukung kenaikan status bagi Palestina dari sekedar entitas pengamat ( <i>non-member observer entity</i> ) menjadi negara pengamat non-anggota ( <i>non-member observer state</i> ) dalam Sidang Majelis Umum PBB.
6	01 Maret 2014	Dalam Konferensi CEAPAD II, Indonesia mengundang sektor swasta dalam agenda utama yakni pertemuan bisnis dengan para pengusaha Palestina dan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta turut dibahas kerjasama bidng pariwisata
7	2 Januri 2009	Bantuan Regional keberangkatan Realwan Kemanusiaan dalam Tim Advance
8	01 Agustus 2010	Dua mahasiswa penerima beasiswa asal Palestina tiba di Indonesia

9	07 Oktober 2011	Dua pelajar SMA penerima beasiswa asal Palestina tiba di Indonesia
---	-----------------	--

Pada sidang khusus Komisis HAM PBB yang dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 19 Oktober 2000, Indonesia bersama dengan 19 negara lainnya dari total 53 negara anggota yang hadir menyetujui resolusi yang menghasilkan beberapa poin penting diantaranya:

1. Membentuk Komisi Penyelidik HAM dengan tujuan mengumpulkan informasi terkait pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di wilayah yang telah dikuasai Israel, serta melaporkan kesimpulan dan temuan-temuan yang didapat di lapangan kepada Komisi HAM PBB.
2. Meminta Komisararis Tinggi PBB untuk HAM segera melakukan kunjungan ke wilayah Palestina yang telah diduduki Israel dengan tujuan guna menghimpun pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap rakyat Palestina oleh Israel.

Dalam forum PBB, Indonesia kembali berhasil terpilih untuk ketiga kalinya pada pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2006 di Indonesia. Guna membayar kepercayaan dunia internasional atas terpilihnya kembali Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB, maka Indonesia membutuhkan program kerja yang baik. Khususnya kontribusi Indonesia dalam permasalahan regional di Timur Tengah, program kerja yang dirancang oleh

Indonesia mencakup beberapa poin penting terkait permasalahan Palestina yang berisi:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan mendirikan sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sehingga dapat terwujud cita-cita untuk hidup damai secara berdampingan dengan Israel sesuai dengan resolusi PBB, Inisiatif Damai 2002 serta Peta Jalan Damai 2003, dan Hasil KTT Liga Arab pada Maret 2007.
2. Dalam rangka mendukung pemulihan kembali proses perdamaian yang sempat tertunda di kawasan Timur Tengah khususnya kawasan konflik Israel – Palestina maka secara komprehensif Negara Kesatuan Republik Indonesia menyerukan beberapa hal, yakni :
  - a. Mendukung sepenuhnya Resolusi Dewan Keamanan PBB diantaranya No. 194 (1948) yaitu Majelis Umum menegaskan bahwa harus diizinkan secepat mungkin bagi pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai dengan tetangganya, dan demikian juga harus mendapatkan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan harta benda yang ditinggalkan sesuai dengan hukum internasional dan standar keadilan bagi mereka yang tidak ingin kembali lagi (Rahman, 2002, hal. 274). Mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina dan negara Arab

lainnya, sesuai dengan isi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 yaitu memutuskan bahwa Israel harus menarik kembali kekuatan militernya dari daerah pendudukannya pasca perang kedua Arab – Israel pada tahun 1967 (Halina, 2008) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1860 yaitu untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina maka dibutuhkan itikad baik dari kedua pihak.

- b. Penghentian pendekatan militer maupun unilateral Israel terhadap Palestina.
- c. Kearifan masyarakat untuk mendukung tercapainya resolusi komprehensif atas konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang merupakan akar permasalahan di kawasan Timur Tengah.
- d. Menciptakan persatuan dan rekonsiliasi internal Palestina faksi Hamas dan Al Fatah yang memiliki perbedaan sudut pandang mengenai metode perjuangan.
- e. Melanjutkan bantuan finansial untuk Palestina.

Dukungan Indonesia untuk bangsa Palestina juga dinyatakan dalam lembaga tinggi PBB lainnya yaitu Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Sebagai anggota Dewan HAM PBB Indonesia berhasil dalam menginisiasi dilaksanakannya *Special Session* Dewan HAM PBB di Palais des Nations, Jenewa, Swiss pada tanggal 9 -12 Januari 2009. Dalam sidang tersebut, pembahasan difokuskan pada permasalahan kondisi

bangsa Palestina yang semakin memprihatinkan pasca serangan militer Israel pada bulan Desember 2008. Dalam sidang SSDHAM delegasi Indonesia memberikan penegasan dalam pernyataannya bahwa masyarakat Internasional tidak akan tinggal diam dan berpangku tangan menunggu eskalasi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dialami oleh bangsa Palestina di jalur Gaza. Oleh karena itu delegasi Republik Indonesia akan terus mendesak Dewan HAM sebagai lembaga berkompeten untuk menangani pelanggaran HAM yang terjadi hingga disahkannya ranres “*The Grave Violation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory, particularly due to the recent Israeli military attacks against the Occupied Gaza Strip*”.

Indonesia juga turut andil memberikan dukungan hak suara penuh (sebagai salah satu *co-sponsor*) dalam Sidang Majelis Umum PBB yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2012 di New York Amerika Serikat. Dalam sidang ini Palestina mendapatkan kenaikan status dari sekedar entitas pengamat (*non-member observer entity*) menjadi negara pengamat non-anggota (*non-member observer state*). Meski Palestina telah diakui sebagai entitas negara, Palestina masih belum termasuk sebagai anggota PBB itu sendiri. Terdapat 138 negara yang memberikan dukungan untuk Palestina pada voting yang dilaksanakan dalam sidang Majelis Umum PBB tersebut, 9 negara yang menolak yaitu Amerika Serikat, Republik Ceko, Israel, Panama, dan negara-negara di Kepulauan Pasifik; Micronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshal , dan 41 negara abstain (Isu Palestina, 2016). Selain itu ada 70 negara yang

berkedudukan sebagai pionir pendukung rancangan resolusi diantaranya Afrika Selatan, Aljazair, Angola, Brasil, Cina, Kenya, Kuba, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Pakistan, Peru, Qatar, Yordania, Venezuela, dan Zimbabwe.

Kerjasama Indonesia dengan Palestina dalam bidang ekonomi juga terjalin dengan baik, Indonesia bertekad akan terus mengefektifkan kerja sama bisnis (*Join Business Council*) antar kedua negara. Ketika terjadi agresi militer Israel di jalur Gaza pada tahun 2008, bantuan kemanusiaan telah diberikan Indonesia melalui *Join Business Council* kepada bangsa Palestina senilai satu juta dolar AS. Dalam Konferensi CEAPAD II (*Conference Among East Asian Countries for Palestinian Development*) yang dilaksanakan pada 1 Maret 2014 di Indonesia turut mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi (Fitriyanti, 2014). Agenda utama dalam konferensi tersebut yaitu mengadakan pertemuan bisnis dengan para pengusaha Palestina dan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Kerjasama dalam bidang Pariwisata pun turut dibahas dalam konferensi CEAPAD II. Terdapat lebih dari 48.000 warga Indonesia yang berkunjung ke Palestina dengan tujuan untuk melakukan wisata religi. Seperti yang kita tahu, hal ini dikarenakan Palestina terkenal sebagai salah satu tempat dengan banyak peninggalan dari Nabi dan Rasul. Palestina memang dikenal sebagai kota para Nabi hal ini sudah sejak lama telah diakui baik oleh muslim maupun non-muslim di dunia (Fitriyanti, 2014).

Bantuan regional Indonesia untuk Palestina terwujud pada tanggal 2 Januari 2009, yakni sebanyak 15 orang dengan 6 orang diantaranya merupakan dokter yang tergabung dalam misi kemanusiaan Tim Advance berhasil masuk ke wilayah Palestina. Keberangkatan Tim Advance ke Palestina dipimpin oleh Dr. Rustam Syarifudin Pakaya selain memberangkatkan relawan kemanusiaan, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan dana sebesar dua milyar rupiah serta obat-obatan seberat dua ton yang akan digunakan untuk menolong warga Palestina, khususnya anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi korban gempuran Israel. Anggota tim yang diberangkatkan yaitu Rustam Syarifudin Pakaya (PPK Depkes), Lucky Tjahjono (PPK Depkes), Mahendro Wisnu Wardono (Metro TV), Sahlan Basir (TVRI), Joserizal Jurnalis (Mer-C), Mursalin (Mer-C), Aidil Chandra Salim (Deplu), Arif Rahman (Muhammadiyah), Ismail Fahmi (TV-One), Firtra Ratory (TV-One), Hanibal Widada Yudya Wijayanta (Anteve), Agoes Kooshartoro (BSMI), Basuki Supartono (BSMI), Nirzam Fahmi (Trans TV) (Menteri Kesehatan Melepas Keberangkatan Tim Advance, 2009).

Relawan Kemanusiaan Bulan Sabit Merah Indonesia berhasil menembus perbatasan Gaza pada tahun 2009 ketika gencatan senjata pasca perang selama empat belas hari yang menewaskan 2000 penduduk sipil Gaza. Relawan Kemanusiaan BSMI yang diberangkatkan ke jalur Gaza kemudian menggelar operasi bedah kepada korban, trauma healing, dan pelayanan kesehatan serta bantuan alat-alat kesehatan dan ambulan yang nilainya lebih dari 5 miliar rupiah. Sepulangnya dari

menyelesaikan tugas kemanusiaan di jalur Gaza pada awal Agustus 2010, para relawan ini sekaligus membawa dua orang penerima beasiswa beserta keluarganya yang akan menempuh pendidikan dokter di Universitas Indonesia (UI) dalam pendidikan dokter spesialis neurologi dan Universitas Gadjah Mada (UGM) spesialis anestesi. Program beasiswa BSMI juga diberikan, pada 7 Oktober 2011 dua orang siswa SMA asal Gaza tiba di Indonesia berkesempatan mendapat beasiswa studi pendidikan dokter umum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Capacity Building Palestine: Program Basiswa BSIM, 2011)

### **C. Tujuan Indonesia Menjalin Hubungan Diplomatik dengan Palestina**

Palestina merupakan negara yang telah lama mengalami penjajahan jauh sebelum Republik Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, hingga Indonesia mendapatkan *title* kedaulatan dan kemerdekaan dari berbagai pihak termasuk negara Palestina itu sendiri. Hal itulah yang mengawali Indonesia merasa terpanggil jiwa dan tergerak hatinya untuk membantu Palestina mendapatkan kedaulatan serta hak menentukan nasib bangsanya sendiri, dan terlepas dari penjajahan Israel.

Hubungan Indonesia dengan Palestina dalam bidang politik telah sejak lama terjalin dengan baik. Menurut pemerintahan Indonesia, perdamaian Palestina akan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini didasari pada semangat untuk menjaga perdamaian dunia sesuai dengan haluan politik luar negeri yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni politik luar negeri yang bebas aktif.

Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan solidaritas antar sesama negara berkembang, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak segala bentuk penjajahan, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional. Substansi konstitusi tersebut menunjukkan bahwa dalam hal kebijakan politik luar negeri Indonesia harus berbasis pada semangat dan nilai-nilai kemerdekaan serta anti-kolonialisme yang berarti tidak diintervensi oleh alasan politik dari negara lain maupun hegemoni kekuatan asing.

Selain atas dasar konstitusi negara Republik Indonesia posisi pemerintahan Indonesia dalam konflik yang dihadapi Palestina melawan Israel, mendapatkan momentum yang menguntungkan ketika Indonesia kembali terpilih untuk yang ketiga kalinya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada saat itu Indonesia mendapatkan dukungan suara penuh sebanyak 158 suara dari jumlah total 192 negara anggota yang memiliki hak pilih. Hal ini mencerminkan bahwa adanya pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan sumbangsih Indonesia dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dunia.

Alasan lainnya yaitu karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan predikat negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang memiliki misi moderat dan juga merupakan negara terbesar keempat populasinya di Dewan Keamanan PBB. Alasan-alasan tersebut cukup kuat untuk menjadikan Indonesia terpilih sebagai anggota DK PBB, karena *Calvocoressi* (1985) menjelaskan bahwa Majelis Umum

PBB, sesuai dengan yang tertuang dalam Charter, dalam rangka memilih anggota DK PBB maka harus ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan diantaranya:

1. Kontribusi calon negara anggota tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
2. Kepantasan perwakilan geografi (*Equitable geographical distribution*) yang dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang mewakili kawasan ASIA (G. R Berridge and A. Jennings, 1985, hal. 17-18).

Terpilihnya Jokowi sebagai orang ke tujuh yang menjabat sebagai Presiden RI membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia masih konsisten hingga detik ini untuk membantu Palestina dengan mendukung proses perdamaian dan mendorong berdirinya sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan ibu kota di Yerusalem Timur dan hidup secara damai berdampingan dengan negara tetangga lainnya. Sesuai dengan prinsip *two-state solution* yang terkandung dalam Resolusi DK PBB No. 242 (1967), Resolusi DK PBB No. 1860 (2009), dan *Peace Roadmap* (2003). Sebagai negara yang memiliki seorang presiden yang beragama muslim dan memiliki mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia, maka sudah sepatutnyalah bangsa Indonesia memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Palestina. Tidak sedikit bantuan, dukungan, dan gerakan moral yang telah dilakukan dan diberikan saudara muslim di Indonesia untuk bangsa Palestina. Dengan maksud agar Palestina dapat merdeka, berdaulat, dan menentukan nasib bangsanya sendiri. Oleh karena itu, tujuan utama Jokowi sebagai presiden RI dalam melanjutkan konsistensi Indonesia

menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina yakni untuk mencapai terwujudnya perdamaian dunia yang bebas dari segala bentuk penjajahan salah satunya melalui kemerdekaan Palestina yakni mencapai cita-cita yang selama ini diimpikan oleh bangsa Palestina. Melalui cara tersebut, Indonesia dapat membalas segala upaya dan jasa Palestina yang saat itu telah bersusah payah membantu Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari berbagai negara di dunia bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pada saat itu Palestina juga berani untuk mengakui kepada seluruh Negara bahwa Indonesia telah merdeka karena Palestina merupakan bangsa pertama yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia di Radio Internasional melalui Mufti Palestina yang bernama Amin Al Husaini.